

**PERAN KPU SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
DALAM MENEGAKKAN DEMOKRASI UNTUK MEWUJUDKAN
KEDAULATAN RAKYAT****Devi Vanessa Armi Putri¹, Astrid Calista Saraswati Sejahtera², Aida Jihannisa
Haidar³, Zakia Sofi Salsa Bela Laili⁴, Nouval Dwi Bhara Daksa⁵**nessaputri609@gmail.com¹, astridcalista2004@gmail.com², aida.jihannisa.haidar@gmail.com³,
salsasofi757@gmail.com⁴, pulaukapuk094@gmail.com⁵**Universitas Tidar**

Abstrak: KPU adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu). Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peran krusial sebagai penyelenggara pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Sebagai lembaga independen, KPU bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang transparan, adil, dan bebas dari manipulasi, yang merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi. Dalam konteks ini, peran KPU sangat penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, di mana keputusan-keputusan politik ditentukan oleh suara rakyat secara langsung. Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas oleh KPU menjadi landasan bagi terciptanya pemerintahan yang sah, akuntabel, serta memiliki legitimasi yang kuat di mata rakyat. Oleh karena itu, KPU tidak hanya bertugas dalam proses administratif pemilu, tetapi juga berperan sebagai pengawal demokrasi untuk memastikan bahwa hak politik setiap warga negara dilindungi. Dalam upaya menegakkan demokrasi, KPU juga dihadapkan pada tantangan untuk terus meningkatkan sistem pemilu agar dapat merespons dinamika sosial dan politik yang berkembang, guna memastikan tercapainya tujuan utama dari demokrasi, yakni kedaulatan rakyat. Pemilihan umum atau pemilu merupakan sarana untuk menyampaikan suara rakyat, kegiatan ini pastinya berhubungan dengan politik dan juga pergantian pemimpin. Dimana kami memilih menggunakan Metode penelitian kualitatif, Metode ini berfokus pada pendapat atau gagasan yang diberikan oleh individu atau kelompok yang diteliti. Dan dari penelitian ini, Pelaksanaan pemilu diharapkan untuk mendapatkan atau memiliki pemimpin yang dapat menyejahterakan dan juga adil dengan kebijakan yang diterapkan pada periodenya. Pemilu juga dihubungkan dengan kedaulatan rakyat, kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berada di tangan rakyat.

Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum, Rakyat, Demokrasi.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum atau pemilu merupakan sarana untuk menyampaikan suara rakyat, kegiatan ini pastinya berhubungan dengan politik dan juga pergantian pemimpin. Pemilu memiliki tujuan untuk menyeleksi calon-calon yang kedepannya akan menjadi pemimpin maupun anggota lembaga negara. Pemilu merupakan instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi, sebagai penyaluran atas hak asasi manusia. Pemilu juga merupakan legalitas dan legitimasi politik dalam demokrasi modern, dalam negara yang punya penduduk besar dilakukan melalui sistem perwakilan (Representative Democracy atau Indirect Democracy) yang dipilih lewat pemilu. Di dalam pemilihan umum ini, rakyat akan memilih pilihan yang menurutnya paling baik.¹

Pemilu dilaksanakan harus sesuai dengan Asas-asasnya yaitu *luberjurdil*, berikut penjelasannya :

- **Langsung:** Masyarakat melakukan pemilu secara sesuai dengan pilihannya tanpa perantara.
- **Umum:** Semua warga tanpa memandang suku, ras, budaya, agama dapat mengikuti kegiatan ini hal tersebut.
- **Bebas:** Masyarakat menentukan pilihannya tanpa adanya suap dari calonnya.
- **Rahasia:** Dalam kegiatan pemilihan umum ini sudah dipastikan bahwa sifatnya yaitu suara masyarakat tidak akan terlihat oleh masyarakat lain dan dipastikan juga tidak akan diketahui oleh siapapun.
- **Jujur:** Pihak yang mengikuti kegiatan ini harus bersikap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- **Adil:** Pemilihan umum juga harus dilaksanakan dengan tanpa kecurangan dalam bentuk apapun.²

Tujuan dilaksanakannya pemilu adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat, lalu untuk memilih wakil rakyat (berada di lembaga DPR, DPD dan DPRD), melaksanakan pergantian personal pemerintahan (secara damai, aman, dan tertib), dan untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

Adapun landasan hukum dalam pemilu, yaitu;

- Landasan Ideal yaitu Pancasila, terutama sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan (sila-4).
- Landasan Konstitusional, yaitu UUD 1945 yang termuat didalam pasal 22E tentang pemilu.
- Landasan Operasional, yaitu peraturan perundangan-undangan lainnya

Di dalam pemilihan umum terdapat 3 lembaga yang memiliki tugas berbeda-beda, lembaga tersebut yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP.

- KPU/Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas yaitu sebagai penyelenggara atau pelaksana pemilihan umum yang memiliki 7 anggota.
- Bawaslu/Badan Pengawas Pemilu adalah bertugas untuk mengawasi kegiatan pemilihan umum diseluruh wilayah Indonesia, lembaga ini beranggotakan 5 orang.
- DKPP/Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu lembaga ini bertugas untuk menyelidiki pengaduan dan laporan dugaan pelanggaran etik.³

¹ AS AN, Kama AZ. Efektivitas Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis. *Journal of Lex Generalis (JLG)*. 2021 Feb 24;2(2):845-58.

² www.detik.com diakses pada 17 November 2024

³ Fahmi M, Pasha Z, Akbar K. Sengkarut Pola Hubungan Lembaga Penyelenggara Pemilu di Daerah Otonomi Khusus. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*. 2020 Apr 1;10(1):1-31.

Membicarakan pemilihan umum pasti tidak jauh dengan kata politik, politik memiliki kaitan bersama pemilihan umum. Petugas Penghubung adalah pengurus Partai Politik yang bertugas sebagai penghubung antara Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon, penyusunan dan penetapan DCS, pengajuan pengganti bakal calon, serta penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. KPU menetapkan peraturan KPU No.20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.⁴

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia dari sudut pandang yang mendalam. Metode ini berfokus pada pendapat atau gagasan yang diberikan oleh individu atau kelompok yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berusaha memahami konteks sosial, budaya, dan historis di mana fenomena tersebut terjadi. Kemudian penulis mengumpulkan data dengan metode penelitian survei dengan memberikan pertanyaan kepada sekelompok orang dan meminta mereka untuk memberikan jawaban dari apa yang mereka rasakan dan mereka alami selama ini.

Berikut beberapa tanggapan dari rekan rekan mahasiswa yang telah mengisi survei kami:

- Menurut saya sudah cukup membuktikan karena dengan adanya pemilu masyarakat bisa bebas memilih sendiri tanpa diwakilkan dan tanpa paksaan dari pihak manapun
- KPU dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk melaksanakan pemilihan yang demokratis, tetapi pemilu yang benar-benar mewakili kedaulatan rakyat membutuhkan dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat, termasuk partai politik, media, dan masyarakat sipil.⁵ KPU dapat membantu menciptakan sistem yang adil dan terpercaya, namun pada akhirnya, pemilu yang demokratis dan berdaulat tergantung pada partisipasi dan keputusan rakyat itu sendiri.
- Peran KPU dalam melaksanakan kegiatan Pemilu sudah cukup membuktikan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun, hal itu tidaklah cukup tanpa partisipasi aktif masyarakat serta kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada lembaga tersebut.
- Sebenarnya sudah ya, tetapi menurut saya tidak sepenuhnya berada ditangan rakyat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di zaman seperti sekarang, pemilu kerap kali diwarnai oleh banyak money politik. Money politics atau politik uang merujuk pada praktik penggunaan uang atau sumber daya finansial untuk mempengaruhi atau membeli dukungan politik dalam suatu proses pemilihan umum, kebijakan, atau keputusan politik. Ini bisa melibatkan pemberian uang, hadiah, atau janji-janji materiil lainnya kepada pemilih, partai politik, atau individu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan politik, seperti kemenangan dalam pemilu atau dukungan terhadap kebijakan tertentu. Politik uang dianggap sebagai bentuk praktik korupsi karena mencederai prinsip-prinsip demokrasi yang sehat, seperti persaingan yang adil dan transparan. Dalam konteks pemilu, politik uang sering dikritik karena mengaburkan kehendak rakyat yang seharusnya berdasarkan pada kualitas visi dan kebijakan calon pemimpin, bukan pada imbalan finansial. Praktik ini juga dapat memperburuk ketimpangan

⁴ www.diy.kpu.go.id diakses 17 November 2024

⁵ <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-112200000000113/swf/7558/PPRA%2064%20-%20100%20S.pdf> diakses pada 17 November 2024

sosial dan mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih mengutamakan kepentingan materi daripada kepentingan publik.

Hal tersebut yang membuat banyak asas pemilu tidak terlaksana secara sportif. Salah satu contohnya adalah asas bebas, dimana asas tersebut bertujuan bahwa setiap warga negara bebas menentukan pilihannya sesuai dengan kehendak hati nurani dan tanpa paksaan dari siapa pun, namun kenyataan dalam pemilu belakangan ini banyak terjadi penyuapan dari para calon, yang secara tidak langsung membuat para warga masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya dengan benar. Tidak hanya dengan penyuapan melalui kegiatan masyarakat, melalui oknum yang nantinya akan mendatangi warga masyarakat secara langsung dari rumah ke rumah, dengan keinginan untuk mendengar keluhan masyarakat yang pada akhirnya berujung dengan pemberian uang yang kita sebut sebagai money politik. Hal ini terjadi karena rendahnya pengetahuan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Oleh karena itu, KPU harus melakukan program agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam pemilu tersebut. KPU sendiri mulai melakukan program dari mulai Pendidikan Politik Rakyat dan Memaksimalkan Fungsi Partai Politik dimana partai politik memiliki fungsi Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁶

Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan keatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, dan penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Terlepas dari itu, dalam kegiatan pemilu tersebut KPU juga memiliki hambatan mulai dari Beban Tugas KPPS, Pendistribusian Logistik, Validasi Data Pemilih, Politik Uang, dan Penyebaran Hoax atau Hate Speech saat masa Kampanye. Selain itu, masih banyak lagi tantangan yang dihadapi dalam pemilu. Salah satunya adalah rendahnya partisipasi pemilih. Meskipun Indonesia menganut sistem pemilihan langsung, namun angka partisipasi pemilih di Indonesia masih terbilang rendah. Hal ini tentu akan berdampak pada legitimasi pemerintah yang terpilih, karena semakin rendah partisipasi pemilih, semakin sedikit dukungan yang diterima oleh pemerintah yang terpilih, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Salah satunya adalah dengan memberikan edukasi politik yang lebih baik kepada masyarakat, terutama masyarakat pedesaan dan masyarakat yang kurang terdidik. Perlu juga dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya hak suara dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat, selain tantangan partisipasi pemilih masih banyak lagi tantangan dalam pemilu yang perlu diatasi. Salah satunya adalah politik uang. Politik uang menjadi salah satu masalah serius dalam pemilu, karena dapat merusak demokrasi dan mempengaruhi keputusan pemilih, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan ketat terhadap kampanye politik dan pendanaannya. Dalam hal ini, peran KPU dan Bawaslu sangat penting. KPU harus memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan dengan transparan dan akuntabel, sedangkan Bawaslu harus bertindak tegas terhadap pelanggaran yang terjadi selama pemilu. Selain itu, perlu juga dilakukan kerjasama antara KPU, Bawaslu, dan pihak kepolisian untuk mengawasi jalannya pemilu. Dengan mengatasi tantangan-tantangan yang ada, diharapkan pemilu di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih demokratis. Pemilu yang

⁶ Novianty F, Octavia E. *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik bagi Pemilih Pemula di Kecamatan Pontianak Barat*. Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial. 2018 Dec 1;5(2):293-303.

demokratis dapat memberikan legitimasi yang kuat bagi pemerintah yang terpilih, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat.⁷

Menurut Sarbaini (2015:107) menyatakan bahwa Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara umum Pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan. Selain dari definisi di atas Morrison (2005:17) mengemukakan bahwa pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara. Bisa juga dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu adalah implementasi dari sistem pelaksanaan demokrasi secara sesungguhnya.

KESIMPULAN

Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum (pemilu) memiliki posisi yang sangat strategis dalam menegakkan demokrasi dan mewujudkan kedaulatan rakyat. KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemilu dilaksanakan secara jujur, adil, dan transparan, yang memungkinkan setiap warga negara memiliki hak yang setara dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat. Melalui tugas-tugasnya, KPU berperan sebagai pengawal integritas pemilu dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Dalam menghadapi tantangan sosial dan politik yang dinamis, KPU perlu terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pemilu, serta memperkuat pendidikan pemilih untuk memastikan partisipasi rakyat yang maksimal. Dengan demikian, keberhasilan KPU dalam menjalankan tugasnya akan berkontribusi besar pada terwujudnya kedaulatan rakyat, di mana keputusan politik sepenuhnya berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Pelaksanaan pemilu diharapkan untuk mendapatkan atau memiliki pemimpin yang dapat menyejahterakan dan juga adil dengan kebijakan yang diterapkan pada periodenya. Pemilu juga dihubungkan dengan kedaulatan rakyat, kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berada di tangan rakyat. Segala hal yang tujuannya untuk mendapatkan atau memilih pemimpin yang diterapkan dengan sebutan Pemilu adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat. Untuk saat ini diharapkan dengan adanya pemilu untuk memilih pemimpin dilakukan dengan jujur dan tanpa adanya suap, karena yang masyarakat butuhkan ialah pemimpin yang jujur dan melaksanakan wewenangnya.

Saran

Dalam Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas KPU harus terus meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari pendaftaran calon hingga penghitungan suara. Penggunaan teknologi yang lebih modern dan sistematis, seperti e-voting atau sistem penghitungan suara digital, dapat membantu memastikan akurasi dan kecepatan hasil pemilu, serta mengurangi potensi kecurangan. Agar pemilu dapat mencerminkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya, pendidikan pemilih harus menjadi prioritas. KPU perlu bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, serta memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pemilih, proses pemilu, serta pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu. Untuk menjaga integritas pemilu, KPU harus memperkuat kerjasama dengan lembaga pengawasan independen, seperti Bawaslu dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan bebas dari kecurangan dan praktik-praktik yang merusak demokrasi. Selain itu, peningkatan peran teknologi dalam pengawasan dapat menjadi salah satu cara untuk mendeteksi dan mencegah penyimpangan dalam proses pemilu.

KPU perlu menciptakan sistem pemilu yang inklusif, di mana setiap warga negara,

⁷ Halilah S. *Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada Serta Meminimalisir Golput*. Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara. 2022 Dec 29;5(II).

termasuk kelompok marjinal, dapat dengan mudah mengakses informasi pemilu dan berpartisipasi dalam pemilihan. Hal ini termasuk penyediaan fasilitas pemilu yang ramah disabilitas dan sosialisasi kepada pemilih di daerah terpencil. KPU juga harus secara rutin melakukan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang telah dilaksanakan, untuk menemukan kelemahan dan area yang perlu diperbaiki. Inovasi dalam tata kelola pemilu perlu dilakukan agar sistem pemilu tetap relevan dengan perkembangan zaman dan dapat merespons kebutuhan demokrasi yang lebih dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- AR, M. Y. (2010). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pendidikan Politik. Universitas, 45.
- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 8(1).
- Djuyandi, Y. (2014). Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum. *Humaniora*, 5(2), 1202-1212.
- Marzuki, S. (2008). Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(3), 493-412.
- Noor, T. (2009). Peran Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum. *KONSTITUSI Jurnal*, 2(1), 52.
- Nugroho, D. A., & Sukmariningsih, R. M. (2020). Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. *Jurnal Juristic*, 1(01), 22-32.
- Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansah, A. G. (2020). strategi komisi pemilihan umum kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 3(2), 251-272.
- Putri, M. P. (2016). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 30.
- Santoso, R. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum dan partai politik dalam mewujudkan demokrasi berintegritas. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 7(02), 252-261.